



Sorot  
Isu



# NIKEL-KU SAYANG, LINGKUNGAN-KU MALANG

Kajian Kritis: Dilema dan Ironi  
Transisi Energi di Indonesia

Oleh: Muda Bicara ID



# **Nikel-Ku Sayang, Lingkunganku Malang: Dilema dan Ironi Transisi Energi di Indonesia**

Pengarah :

- Muhammad Iqbal Khatami
- Moch Edward Trias Pahlevi
- Azka Abdi Amrurobbi

Peneliti :

- Muhamad Fikri Asy'ari

Editor dan Kurator :

- Muhammad Iqbal Khatami

Penyuntingan dan Tata Letak: Muda Bicara ID

[www.mudabicara.id](http://www.mudabicara.id)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit





# Ringkasan Eksekutif

Nikel menjadi salah satu logam paling diburu di era transisi energi saat ini, mengingat perannya yang krusial dalam produksi baterai, terutama untuk kendaraan listrik. Indonesia, sebagai negara dengan cadangan bijih nikel yang melimpah, memanfaatkan peluang ini dengan melarang ekspor bahan mentah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri secara mandiri.

Namun, di balik strategi tersebut, proses ekstraksi nikel kerap tidak diiringi dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat setempat. Walhasil, terjadi kerusakan lingkungan yang secara masif, seperti pembabatan hutan, pencemaran sumber air, sungai, laut, hingga udara. Bahkan, Pulau Raja Ampat, yang dikenal dengan destinasi wisata bak “surga yang turun ke bumi” pun tak luput dari rakusnya eksploitasi pertambangan.

## **Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini antara lain:**

1. Menghentikan seluruh aktivitas dan mencabut izin tambang tambang yang bermasalah
2. Melakukan rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak oleh tambang
3. Memperkuat perlindungan terhadap hak atas tanah adat
4. Mengembangkan sektor ekonomi alternatif non - tambang yang berkelanjutan

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat meninjau ulang, bahkan menghentikan, aktivitas pertambangan yang telah mengganggu kelestarian alam dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut.





# 01. Nikel: Berkah atau Bencana

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, nikel menjadi perhatian utama pemerintah karena perannya dalam program hilirisasi industri. Program ini bertujuan menjadikan nikel sebagai bahan baku utama dalam produksi baterai kendaraan listrik (electric vehicle), serta mendorong Indonesia menjadi pusat produksi dunia dalam ekosistem baterai dan komponen kendaraan listrik dunia.

Sebagai langkah konkrit, pemerintah telah menerbitkan **Peraturan Menteri ESDM No.17 Tahun 2020** yang melarang ekspor bijih nikel mentah dan mewajibkan pengolahannya di dalam negeri sebelum diekspor.

**Saat ini, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dengan lebih dari 5,3 miliar ton bijih dengan total sumber daya yang mencapai 18,5 miliar ton bijih, menguasai 42% - 43% cadangan nikel global.**

Apabila dilihat dari sisi ekonomi, implementasi kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan pendapatan negara dari ekspor nikel.

- Ekspor nikel Indonesia melonjak dari Rp 45 triliun (2015) menjadi Rp 520 triliun (2023).
- Investasi signifikan, seperti US\$40 miliar dari Tiongkok untuk proyek smelter dan pabrik baterai EV di Indonesia (2024).

Namun, kehadiran pertambangan nikel turut memicu deforestasi skala besar, terutama di wilayah hutan tropis seperti Halmahera dan Sulawesi, dengan gambaran sebagai berikut:

- Deforestasi: Lebih dari 5.300 hektar hutan tropis dibuka sejak 2018 untuk pertambangan nikel, berdampak pada kehilangan habitat satwa liar dan penurunan keanekaragaman hayati.
- Pencemaran: Aktivitas pertambangan menyebabkan pencemaran air dan udara akibat limbah logam berat, mengancam kualitas air minum dan kesehatan masyarakat dengan meningkatnya kasus ISPA.





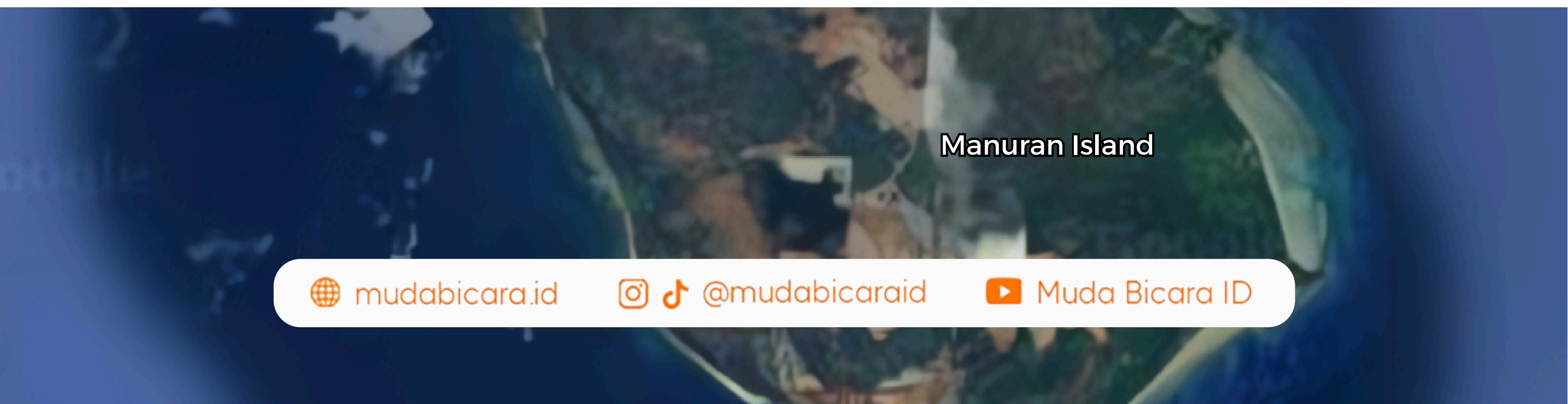
## 02. Nikel di Tanah Raja Ampat



Di tanah yang dikenal sebagai “surga yang jatuh ke bumi”, aktivitas pertambangan nikel marak dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Empat perusahaan yang beroperasi beserta dampak lingkungan yang telah terjadi antara lain:

1. PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran melakukan penambangan tanpa sistem manajemen lingkungan yang memadai dan tanpa ada pengelolaan air limbah larian.
2. PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele beroperasi tanpa memiliki dokumen lingkungan dan tanpa ada Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
3. PT Gag Nikel di Pulau Gag diduga melanggar Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, karena menambang di pulau kecil seluas 6.030 hektare.
4. PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas lima hektare.

Khusus PT Gag Nikel, perusahaan ini telah berjalan sejak tahun 2018, setelah mendapatkan izin pada tahun 2017. Meskipun keempat perusahaan tersebut telah mengantongi izin usaha pertambangan, namun masing - masing tercatat melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan lingkungan hidup.



Manuran Island





## Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Nikel di Raja Ampat: Komitmen Kelestarian, atau sebatas Pahlawan Kesiangan?

Terbaru, Pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, berada di kawasan geopark, dan tidak memenuhi syarat teknis serta administrasi

**Satu perusahaan, PT Gag Nikel, tidak dicabut izinnya karena dinilai patuh terhadap aturan lingkungan, sudah mereklamasi sebagian lahan, berada di luar kawasan geopark, serta merupakan aset negara;**

- Langkah pemerintah ini dinilai banyak pihak, termasuk aktivis lingkungan dan anggota legislatif, masih setengah hati dan terkesan pahlawan kesiangan, karena tidak menyelesaikan akar masalah eksploitasi sumber daya di pulau kecil yang sensitif secara ekologis
- Selama masih ada satu perusahaan tambang besar yang beroperasi, komitmen pemerintah terhadap kelestarian Raja Ampat dianggap belum sepenuhnya nyata dan hanya sebatas respons atas tekanan publik.







## 03. Jejak Nikel di Maluku Utara

Maluku Utara telah menanggung lama beban berat akibat aktivitas pertambangan nikel yang dimulai sejak 2019 oleh Weda Bay Nickel (WBN) di wilayah Halmahera Tengah dan Timur. WBN merupakan bagian dari Kawasan Industri Terpadu Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang berlokasi di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah. IWIP berfokus pada pengolahan logam berat, khususnya nikel, dengan fasilitas smelter dan infrastruktur pendukung lainnya.

Kepemilikan WBN mayoritas berasal dari perusahaan Tsingshan Group asal Tiongkok (51,3%), diikuti oleh perusahaan Prancis, Eramet (37,8%), dan BUMN melalui PT Aneka Tambang (10%). Proyek ini menjadi salah satu tambang nikel terbesar di dunia dan memainkan peranan penting dalam rantai pasok industri nikel global. Operasinya bahkan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2069.

**WBN mempekerjakan lebih dari 16.400 orang**, dengan sekitar 68% tenaga kerjanya berasal dari Maluku Utara. Meski memberi kontribusi terhadap lapangan kerja lokal, operasional WBN juga membawa dampak serius pada lingkungan, diantaranya:

- Forest Watch Indonesia mencatatkan deforestasi seluas kurang lebih **1.783 hektare** di wilayah Halmahera Tengah (2021 - 2023).
- Deforestasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total luas **2.612 hektare** mengancam ketersediaan sumber daya air tawar.
- Tercemarnya sungai - sungai oleh logam berat di Teluk Weda, seperti Sungai Ake Jira dan Ake Sagea.
- Rusaknya terumbu karang dan padang lamun seluas **93 hektare** di Teluk Weda karena reklamasi slag nikel.
- Temuan Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako menunjukkan bahwa **23 dari 61 sampel darah** pekerja dan warga sekitar mengandung merkuri dan arsenik dalam kadar yang melebihi ambang batas aman.







## KESIMPULAN

Nikel memang menjadi salah satu harta karun bagi Indonesia dalam mewujudkan komitmen transisi energi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Melalui pengolahan mandiri di dalam negeri, nikel diolah menjadi bahan baku baterai dan komponen pada kendaraan listrik.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah bahkan telah mengeluarkan peraturan menteri yang melarang untuk ekspor bijih nikel mentah. Namun, sayangnya proses ekstraksi nikel masih sering mengabaikan prinsip - prinsip kelestarian lingkungan. Sejumlah industri tambang bahkan beroperasi tanpa dokumen AMDAL yang sah, pada akhirnya berdampak serius terhadap keberlangsungan ekosistem. Selain kerusakan lingkungan, aktivitas ini juga membawa dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.





## Rekomendasi Kebijakan bagi Pemerintah

Berdasarkan uraian di atas, industri pertambangan nikel tampaknya telah memberikan dampak merugikan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Melihat kondisi ini, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah:

### 1. Menghentikan seluruh kegiatan tambang yang bermasalah dan mencabut izin operasionalnya.

- Menghentikan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan mengevaluasi seluruh izin pertambangan serta izin AMDAL.
- Mengaudit lingkungan terhadap seluruh operasi tambang dan smelter nikel yang sudah ada.

### 2. Melakukan pemulihan ekosistem dan rehabilitasi lingkungan yang telah terdampak.

- Mengembalikan fungsi struktur, kesuburan, dan mikroorganisme tanah dalam ekosistem.
- Libatkan masyarakat lokal dalam melakukan penanaman kembali dan pemantauan program rehabilitasi.





### **3. Memperkuat perlindungan hukum dan pengakuan atas hak tanah adat.**

- Memperkuat landasan hukum dan kelembagaan dalam menjamin pengakuan dan perlindungan hak - hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan sumber daya alam yang mereka miliki.

### **4. Mendorong pengembangan sektor ekonomi alternatif yang berkelanjutan di luar industri pertambangan.**

- Dorong pengembangan sektor ekowisata yang telah menjadi ciri khas pulau - pulau kecil, seperti budidaya perikanan dan kelautan.
- Memberikan fasilitas akses ke pasar yang lebih luas.

